

ANALISIS KOMUNIKASI PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA RESAPAN BANJIR DI DANAU TEMPE KABUPATEN WAJO

Andi Adityawarman Mandafi¹, Supratomo², Iqbal Sultan³

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.

²Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

³Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Abstract

This research aims to; 1) To analyze the intensity of meetings between community and government deliberations Floating Village development plan flood catchment area of Lake Tempe in Wajo can increase community participation, 2) Analyze public involvement in local government policy-making deliberations Floating Village development plan flood catchment area of Lake Tempe in Wajo and 3) to analyze the regional government policies that encourage public participation in the deliberations floating village development plan flood catchment area of Lake Tempe in Wajo. This study uses a qualitative method, and the entire participant population is composed of elements musrenbang district and officials, village heads and community, representatives of PMD, Bappeda staff, women community leaders, and NGOs. Sampling technique is purposive sampling Samples with simple random sampling method and maximum likelihood estimation (ML) with a total of 25 respondents. Data analysis was performed by using a model of qualitative approach using qualitative descriptive analysis model. Results of the analysis showed that; 1). The intensity of meetings between the community and the government has begun to awaken musrenbang, so that a good interaction and communication become more in society without exception, just representation of women is still less than its share, 2). Society also has begun to be involved in the process of drafting process activities and make suggestions, 3). The government's policy on musrenbang is the concept of sedimentary basin development planning weir, and the manufacture of the island in the middle.

Keywords : communication; participator; musrenbang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) Menganalisis intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, 2) Menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo dan 3) Menganalisis Kebijakan pemerintah daerah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang menjadi populasi adalah seluruh peserta musrenbang yang terdiri dari unsur camat dan aparat, kepala desa dan masyarakat, perwakilan PMD, pegawai Bappeda, tokoh masyarakat perempuan, dan LSM. Teknik penarikan sampel adalah *Purposive Sampling* Sampel dengan metode *simple random sampling* dan *estimasi maximum Likelihood* (ML) dengan jumlah 25 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model pendekatan kualitatif menggunakan model analisis deksriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ; 1). Intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah dalam musrenbang sudah mulai terbangun, sehingga interaksi dan komunikasi menjadi baik lebih pada masyarakat tanpa terkecuali, hanya saja keterwakilan perempuan andilnya masih kurang, 2). Masyarakat juga sudah mulai dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan, dan memberikan usulan, 3). Kebijakan pemerintah pada musrenbang adalah konsep perencanaan pembangunan bendung bak sedimen, dan pembuatan pulau di tengahnya.

Kata Kunci : komunikasi; partisipatif ; musrenbang

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam visi misi pemerintah provinsi Sulawesi selatan menciptakan masyarakat yang baik (*Good Governance*) khususnya partisipasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang dapat menggambarkan partisipatif masyarakat pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe melalui komunikasi partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penciptaan kondisi pemerintahan yang baik Atau *good governance*. Kondisi ini ditandai dengan karakareistik akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepastian hukum. Kondisi pemerintahan ini akan mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. *Good Governance* dapat tercapai dengan keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian pemerintah dengan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah yang dekat dengan masyarakat akan dapat mengenali kebutuhan, permasalahan, keinginan, aspirasi serta kepentingan masyarakat secara baik dan efektif. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengembangan partisipasi masyarakat. Komunikasi partisipatif merupakan penghubung atau jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah, selain itu masyarakat dianggap sebagai sumber daya utama yang memahami potensi dan masalah yang ada. Sehingga partisipasi masyarakat akan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut juga akan mendorong terciptanya *Good Governance*.

Dengan lahirnya UU No.22/1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengarahkan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Konsekuensi dari otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, Perencanaan pembangunan yang partisipatif menuntut adanya ruang publik yang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan. Ruang publik ini di akomodasi oleh UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang *bottom up*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang partisipatif melakukan penataan organisasi dan tata kerja kelurahan/desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 tahun 2013. Kebijakan tersebut mengatur bahwa salah satu peran kelurahan/desa dalam pemerintahan adalah pemberdayaan

Dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe, daftar usulan yang diajukan dari instansi sudah masuk seminggu sebelum pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, melihat fenomena yang terjadi ada kecenderungan bahwa usulan usulan yang di ajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite desa berdasarkan daftar usulan dari desa tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika proses Musyawarah rencana pembangunan desa tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang. Tidak selarasnya keinginan masyarakat dengan pemerintah sering terjadi sehingga masyarakat merasa dirugikan, oleh karena itu perlunya suatu proses mediasi untuk

mencari titik tengah antara masyarakat dengan pemerintah, informasi sering diberikan tetapi masih bersifat satu arah saja. Sarana bagi masyarakat melakukan *feedback* juga masih kurang. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan. Dan memberikan usulan yang dibatasi. Tetapi hanya sebatas sampai disitu. Pengambilan keputusan tetap ditangan pemerintah. Selain itu kurangnya pengawasan dan control dari masyarakat untuk mengawal proses kegiatan tersebut. Dan yang kedua peran masyarakat sebagai *social control* masih terbatas, kurangnya informasi yang didapat masyarakat.

Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran para pemangku kepentingan penting dalam musyawarah rencana pembangunan, seperti kader desa, tokoh adat, dan keterwakilan perempuan, serta tingkat keterlibatan peserta relative rendah. Seperti yang dikatakan peserta dalam musrenbang Desa Terapung tahun 2013 lalu bahwa kehadiran peserta dalam musrenbang desa hanya semata mata untuk memenuhi undangan pak lurah saja. Kehadirannya hanya lebih banyak sebagai pendengar, sehingga komunikasi yang terjadi hanya satu arah.

Kurangnya pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah membuat proses perencanaan pembangunan tidak efektif dan hanya akan menjadi dokumen semu belaka. Prioritas pembangunan daerah yang menjadi sasaran penetapan rencana kerja daerah Kabupaten Wajo tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD 2014-2019 dengan memperhatikan isu strategis atau isu kebijakan pembangunan. Sedangkan musyawarah perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up*. Dengan mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan.

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan yakni penelitian skripsi Himawan (2008), dengan judul partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Kemiling, kemudian penelitian tesis Joseph dengan judul Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kecamatan gajahmungkur kota Semarang.

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Sejauh mana intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo dapat meningkatkan partisipasi masyarakat?
2. Sejauh mana keterlibatan masyarakat pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo?
3. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo?

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut sering terjadi banjir dan proses pengembangan pembangunan di daerah tersebut berbeda dengan desa desa lainnya.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode penelitian

kombinasi (*Mixed Methods*) yaitu metode yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell Dalam Sugiyono (2012) penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) adalah merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penarikan sampel pada penelitian ini Menurut Arikunto (2009) bahwa: “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti)”. Untuk itu peneliti menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* Pengertian *Purposive Sampling* atau Definisi *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. *Purposive sampling* dikenal juga dengan sampling pertimbangan. *Purposive sampling* ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. oleh karena itu, sampling ini cocok untuk studi kasus yang mana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis Sehingga peneliti mengambil sampel sebanyak 25 orang yang hadir dalam Musyawarah rencana pembangunan,

Teknik analisa data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan dua metode, untuk pendekatan kuantitatif menggunakan model analisis deksriptif kuantitatif. Pada penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data, yaitu menggabungkan kelompok data yang satu dengan yang lainnya sehingga data yang dianalisis berada dalam satu kesatuan dan disajikan dalam bentuk bagan-bagan atau tabel frekuensi.

HASIL

Danau Tempe adalah salah satu danau besar yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo (70%), Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng. Danau ini melintasi 10 Kecamatan dan 51 desa. Secara geografis Danau Tempe terletak pada titik 4°00'00" – 4°15'00" LS dan 119°52'30" – 120°07'30" BT. Danau Tempe yang terbentuk dari depresi lempeng bumi Asia-Australia ini terletak di Wilayah Sungai Walannae Cenranae dan memiliki luas 47.800 ha pada ketinggian 10 m dpl dengan luas daerah tangkapan air (*catchment area*) Danau Tempe seluas 4.587 km². Curah hujan tahunan di daerah danau sebesar 1.400 – 1.800 mm/th sedangkan di daerah DAS sebesar 1.400 – 4.000 mm/th. Tinggi muka air (TMA) Danau Tempe hingga tahun 2001 menunjukkan kondisi yang normal, dengan TMA rata-rata berada pada kisaran 4,078 m – 7,780 m dpl. Kedalaman danau saat ini 3 m ketika musim hujan dan 1 m ketika musim kering. Luas permukaan danau pada musim hujan adalah 48.000 ha dan menggenangi areal persawahan, perkebunan, rumah penduduk, prasarana jalan dan jembatan serta prasarana sosial lainnya yang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Pada musim kering luas danau

hanya mencapai 1.000 ha sedangkan pada kondisi normal luasnya mencapai 15.000-20.000 ha. Sungai yang menuju ke danau terdiri dari 23 sungai yang termasuk dalam 2 DAS yaitu Das Bila dan DAS Walanae, sedangkan aliran sungai dari danau (outlet) hanya satu yaitu Sungai Cenranae yang memiliki panjang sungai 70 km.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pentingnya komunikasi dan partisipasi masyarakat pada musrenbang, ada tiga dimensi yang menjadi indikator pentingnya komunikasi dan informasi, yaitu: koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Penyajian data mengenai dimensi tersebut dideskripsikan perhitungan presentase berdasarkan responden secara keseluruhan. Berdasarkan Kepmen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, skor minimal yang dapat diperoleh dari jumlah responden dikalikan jumlah butir pernyataan dikalikan skor pilihan jawaban minimal. Range rata-rata nilai yang di dapat adalah $5-1 = 4$.

Banyaknya kelas ditentukan 5. Kelas interval diperoleh dari jumlah range dibagi banyaknya kelas didapat 0,8. Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya, tolak ukur yang ditentukan adalah kriteria jumlah skor dengan lima kriteria penilaian, lima kriteria penilaian tersebut dapat digambarkan pada table 1.

Selanjutnya jawaban responden dianalisis berdasarkan sub dimensi dari masing-masing dimensi. Sedangkan, untuk tiap dimensi dari 24 responden dan jumlah butir pernyataan tentang tiap dimensi dengan skor pilihan jawaban 1 sampai 5. Skor maksimal yang dapat diperoleh dari jumlah

responden dikalikan jumlah butir pernyataan dikalikan skor pilihan jawaban maksimal.

Peran komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang saat ini sangatlah penting. Komunikasi pembangunan yang mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan nasional, serta pengelolaan potensi konflik sosial dalam proses pembangunan menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi pembangunan desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe.

Untuk mengaplikasikan teori-teori komunikasi dalam analisis hubungan sosial dalam pemecahan masalah-masalah sosial dan pembangunan terkait dalam bidang ilmu utama atau bidang pembangunan pertanian agar mampu secara kritis menganalisis interaksi / hubungan sosial dalam upaya menemukan pemecahan masalah-masalah sosial dan pembangunan dari perspektif teori komunikasi pembangunan. Terkait dalam bidang ilmu pertanian fungsi komunikasi secara asertif, efektif dan etis.

Hal ini sejalan dengan teori Everett Rogers (1986) seorang pakar riset komunikasi menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka Cangara (2012). Hal ini sejalan dengan Rogers melihat bahwa proses komunikasi adalah suatu ide atau pesan dalam interaksi yang disampaikan dari seseorang kepada penerima atau lebih yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Betapa pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan musrenbang di desa resapan banjir danau tempe Kabupaten Wajo, ada tiga dimensi yang menjadi

indikator pentingnya komunikasi dan informasi, yaitu: koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Deskripsi Intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah dalam musrenbang. Berdasarkan hasil kuesioner peneliti dapat diketahui bahwa intensitas pertemuan kepala desa dan camat dalam musrenbang desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe sudah masuk dalam kategori sangat baik, hal ini terlihat ditunjukkan dari skor yang diperoleh pada tabel 6 dengan skor 105 dengan rata-rata skor 4,38.

Intensitas tingkat pertemuan Kepala desa dengan Camat dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung Wilayah resapan banjir danau tempe, yang ditunjukkan pada hasil kuesioner yang memperlihatkan bahwa pertemuan kepala desa sudah sering dilaksanakan untuk membicarakan masalah danau tempe, sebagian besar kepala desa menyambut dengan baik adanya musrenbang desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe, artinya partisipasi masyarakat dan *stakeholder* sudah mulai terlihat. Ruang partisipasi yang lebih terbuka akan mendorong masyarakat untuk dapat bergerak bersama menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut menandakan bahwa partisipasi masyarakat sudah tergolong baik, karena sebagian masyarakat sudah berasumsi bahwa rencana pembangunan danau tempe selain dapat menjadi obyek wisata, masyarakat juga secara otomatis dapat menikmati hasil pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori yang diuraikan oleh Sundariningrum dalam Sugiyah (2001), mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu;

1.

Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam

proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Untuk itu sangat penting tingkat intensitas pertemuan masyarakat dengan Bappeda dalam musrenbang dalam hal ini diwakilkan kepada kepala desa, karena dengan hadirnya kepala desa berarti sudah ada aspirasi yang terwakilkan dari masyarakat. Baik itu pemberian saran maupun sekedar ikut mendengarkan dan menyampaikannya kembali kepada tetangga atau masyarakat lainnya, hal ini memperlihatkan bahwa tugas Bappeda sudah tepat pada fungsinya walaupun tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan Musrenbang kecamatan tidak semata-mata menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa/kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang desa/ kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Proses Musrenbang yang menganut pendekatan *bottom-up* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, Musrenbang akan menghasilkan rancangan pembangunan yang sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Selama ini,

pelaksanaan Musrenbang di tingkat pusat maupun daerah, belum mengakomodir dan memperhatikan kebutuhan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang desa terapan wilayah resapan banjir danau tempe hanya formalitas tanpa pernah diberi kesempatan bersuara atau didengar suaranya walaupun sering diadakan pertemuan. Jadi dapat dikatakan intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah dalam musrenbang begitu penting sehingga dapat membangun interaksi dan komunikasi yang baik pada masyarakat tanpa terkecuali, tetapi pada kenyataannya andil keterwakilan perempuan masih sangat rendah walaupun intensitas pertemuan sudah sering dilakukan, hal ini terjadi karena suara mereka masih kurang didengarkan, untuk untuk diperlukan partisipasi pemerintah dalam mengatasi hal ini guna mewujudkan *good governance*.

Partisipasi sebagai *good governance* bukan hanya soal kehadiran, melainkan bagaimana hak-hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, adanya ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena pemerintah, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta aktif mengelola barang-barang publik. Yang terakhir, yakni kendali warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintahan.

Deskripsi keterlibatan masyarakat pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam musrenbang wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam musrenbang wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo sudah dapat dikatakan dalam kategori baik, karena kepala desa

serta tokoh masyarakat perempuan sudah mulai dilibatkan walaupun keterlibatan mereka masih kurang dalam setiap kebijakan pemerintah daerah yang akan diambil.

Masyarakat juga sudah mulai dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan, dan memberikan usulan. Tetapi hanya sebatas sampai disitu saja, dalam proses pengambilan keputusan tetap ditangan pemerintah. Selain itu masih kurangnya pengawasan dan control dari masyarakat untuk mengawal proses kegiatan tersebut. Peran masyarakat sebagai *social control* yang masih terbatas, kurangnya informasi yang didapat masyarakat karena yang hadir pada setiap kegiatan musrenbang hanya orang-orang itu saja, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola musrenbang, seperti desa/kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

Data menunjukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrenbang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya minat masyarakat bertanya atau berbicara dalam proses musyawarah rencana pembangunan tahun berikutnya. Lebih parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunan lainnya semakin menurun.

Ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola musrenbang, seperti desa/kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang

diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

Data menunjukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrenbang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Lebih parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunann lainnya semakin menurun.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah rencana pembangunan Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo

Masyarakat desa terapung di sekitar danau tempe menunjukkan partisipasi yang sudah cukup baik dalam musrenbang ini, untuk itu pemerintah sudah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam musrenbang tahun ini. Pemberdayaan masyarakat merupakan satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya masalah pembangunan desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe, maka diperlukan sebuah upaya yang komprehensif, integral, dan berkesinambungan melalui pelaksanaan komunikasi dan partisipasi yang terpadu, konsisten, dan tertata atas dukungan segenap *stake holder* yang ada. Tingkat pemahaman masyarakat tentang prioritas musrenbang desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe sudah mulai baik, karena terlihat banyaknya responden yang bertanya dalam musrenbang. Pemahaman masyarakat tentang musrenbang, terlihat sebagian besar masyarakat menyambut baik musrenbang yang dilaksanakan di daerah mereka, tetapi sebagian dari mereka juga masih tidak setuju kalau wilayah mereka

dibangun, masalahnya mereka berfikir dengan adanya banjir di danau tempe membawa berkah tersendiri bagi mereka karena ikan-ikan lebih mudah didapatkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada musrenbang yaitu : (1) Konsep perencanaan bendung bak sedimen yang diberikan pada titik sungai yang masuk di wilayah danau tempe. Yang nanyonya dapat mengairi beberap persawahan di kabupaten wajo; (2) Pemerintah sudah memutuskan untuk mempercepat pengembangan Danau Tempe termasuk pembuatan pulau di tengahnya, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nantinya, pulau itu akan dijadikan lahan pertanian.

Analisis Alur Proses Komunikasi pada Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) Desa Terapung wilayah resapan banjir Danau Tempe di Kabupaten Wajo. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Proses alur penyerapan aspirasi di sekretariat DPRD Kabupaten Wajo melalui tujuh tahap, yaitu : (1). Aspirasi, (2) Media, (3) Analisis dan Riset, (4) Kegiatan Komunikasi, (5) Publik/Masyarakat. (6) Feedback. (7) Evaluasi dan Pengawasan. Sama Seperti model komunikasi partisipasi dalam

Cangara (2012:51) dimana Mereka melihat komunikasi sebagai suatu proses yang memusat menuju kearah pengertian bersama, menurut Kincaid dapat dicapai meski kebersamaan pengertian pada suatu objek atau pesan tidak pernah sempurna secara penuh. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ada dua orang yang memiliki pengalaman yang sama persis. Antara mereka dapat dicapai kebersamaan pengertian melalui pendekatan yang lebih erat, yakni dengan toleransi pada tingkat yang lebih tinggi. Dimana Penyampaian aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara formal maupun informal. Penyampaian aspirasi secara formal adalah dengan cara tertulis ataupun mengumpulkan tanda tangan dari beberapa warga masyarakat khususnya warga sekitar desa terapung, lalu disalurkan melalui tokoh-tokoh masyarakat maupun kepala desa, kelurahan, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten serta kepada eksekutif maupun legislatif pada daerah pemilihan.

Cara lain selain penyampaian aspirasi secara formal dapat pula disalurkan melalui informal yaitu dengan cara melakukan aksi demo. Aksi demo akan terjadi apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan. Dapat dipastikan bahwa aksi demo adalah untuk menolak atau kurang setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, secara tidak langsung aksi demo tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah. Selain terkadang tidak adanya keterbukaan pikiran dari kedua belah pihak, aksi demo malah dapat menimbulkan masalah baru. Melalui media komunikasi Media komunikasi sangat berperan di dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman informasi di zaman yang serba modern ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling dicari oleh semua orang, untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi

ataupun berita sebab teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, akurat, tepat, mudah, murah, efektif serta efisien. Berbagi informasi antar negara dan benua di belahan dunia manapun semakin sekarang semakin mudah.

Media komunikasi yang digunakan pada musrenbang desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe di Kabupaten Wajo diantaranya adalah melalui media cetak seperti surat kabar, media audio seperti radio yang menyiarkan adanya kegiatan musrenbang baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, kemudian analisis dan riset diperlukan dalam rangka mencapai komunikatif partisipatif yang ditempuh untuk mencapai tujuan mengetahui sampai dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Setelah itu dianalisislah kegiatan riset dengan menyusun daftar kebutuhan masyarakat.

Daftar kebutuhan ini kemudian dibedakan antara daftar kebutuhan yang sifatnya mendesak, agak mendesak, dan tidak terlalu mendesak. Hal ini penting dilakukan agar segera diketahui mana saja program yang nantinya dilaksanakan secepatnya, atau mana yang masih bisa menunggu, sehingga pemerintah bisa mengatur prioritas dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, dengan membawa daftar masalah dan kebutuhan masyarakat, keberadaan musrenbang akan dapat lebih efektif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kegiatan komunikasi di perlukan untuk menjembatani proses mediasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dalam untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang terjadi di forum musyawarah rencana pembangunan tidak berlangsung baik apabila tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, unsure public/masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakatlah yang sangat paham dengan kondisi yang terjadi di wilayahnya. Umpan

balik (feed back) yang ditimbulkan dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi yang dilakukannya. Jadi, umpan balik (*feedback*) merupakan satu-satunya elemen yang dapat 'menjudge' apakah komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Keberlangsungan komunikasi yang dibangun sebelumnya ditentukan oleh umpan balik sebagai bentuk penilaian. Dengan mengetahui umpan balik yang dikirimkan oleh komunikan, maka sebagai komunikator, kita akan dapat langsung mengetahui apakah tujuan dari pesan kita tersampaikan atau tidak. Apakah umpan balik itu berupa respon negatif ataupun respon positif. Umpan balik yang didapatkan pada kegiatan musrenbang desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe pada kabupaten Wajo sudah dapat respon positif dari masyarakat dan legislatif maupun eksekutif. Hal ini terlihat dari keaktifan masyarakat mengikuti pertemuan yang diadakan oleh tingkat kelurahan, maupun pada tingkat kecamatan. Suara mereka sudah mulai didengarkan, mereka menjadi lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada legislatif maupun eksekutif melalui tokoh masyarakat yang ada di daerah mereka khususnya desa terapung. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi *feedback* adalah sebagai mekanisme kendali untuk mengetahui apakah perilaku komunikasi seorang komunikator telah efektif untuk mencapai sasarannya. Seperti halnya pada musrenbang desa terapung wilayah resapan banjir danau tempe pada kabupaten Wajo, perilaku masyarakat pada wilayah tersebut menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan sebagian lagi masih menanggapi dengan sikap yang kurang terbuka. Masyarakat yang menerima atau yang bersikap lebih terbuka sebagian dari mereka sudah mulai mengerti tentang musrenbang yang dilaksanakan di daerah mereka,

khususnya bagi warga desa terapung yang menyadari pentingnya pembangunan bendung gerak di danau tempe yang nantinya akan mendukung sektor pertanian dan perikanan. Lain halnya dengan sebagian warga yang kurang terbuka atau kurang support dengan adanya musrenbang ini, mereka masih berfikir bahwa dengan datangnya banjir akan membawa berkah tersendiri bagi mereka, karena dapat menjadikan sebagai penghasilan tambahan atau mata pencarian yang baru mengingat banjir sudah menjadi langganan mereka setiap musim penghujan. Dalam proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo, banyak sekali terdapat fenomena- fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah pelibatan masyarakat dan *stakeholders* guna menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Fenomena menarik itu antara lain: a) Kurangnya pemahaman masyarakat peserta Musrenbang terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa proses Musrenbang belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar peserta. Tidak ada pemberitahuan secara rinci mengenai bagaimana proses Musrenbang, apa yang akan dibahas dalam Musrenbang, untuk kepentingan apa dan sebagainya; b) Proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga usulan yang diajukan dalam Musrenbang merupakan rumusan elit perwakilan saja tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dilingkungannya kelompok sosial, kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, kalangan swasta dan lain-lain); c) Dalam kegiatan Musrenbang ini

masih terdapat tidak terakomodirnya kehadiran *stakeholders* penting dalam Musrenbang seperti Kader Pembangunan Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, d) Minimnya kegiatan non fisik yang di usulkan dalam Musrenbang, sehingga proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat serta lambatnya tindak lanjut nyata dari hasil Musrenbang, sehingga program/kegiatan yang diusulkan setiap tahun hampir sama; e) Waktu penyelenggaraan sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong timbulnya partisipasi masyarakat yang aktif. Sempitnya waktu inilah yang menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, maka perlu dilakukan semacam evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/187/Kep/ Bangda/ 2007. Adapun untuk mengevaluasi, menurut Dunn dalam Nawawi (2007) dilihat dari: a) Efektivitas, yaitu tentang apakah hasil yang diinginkan dari kegiatan Musrenbang telah tercapai, yang dinilai dari: 1. Tujuan kebijakan, 2. Sasaran kebijakan; b) Efisien, yaitu tentang seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui Musrenbang. Dapat dinilai dari: 1. Dari segi biaya, 2. Dari segi waktu, 3. Dari segi tenaga; c) Kecukupan yaitu tentang apakah program yang dihasilkan dalam musyawarah Musrenbang dapat memuaskan.

KESIMPULAN

Intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah dalam musrenbang begitu penting sehingga dapat membangun interaksi dan komunikasi yang baik pada masyarakat tanpa terkecuali, tetapi pada

kenyataannya andil keterwakilan perempuan masih sangat rendah walaupun intensitas pertemuan sudah sering dilakukan, hal ini terjadi karena suara mereka masih kurang didengarkan.

Masyarakat juga sudah mulai dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan, dan memberikan usulan. Tetapi hanya sebatas sampai disitu saja, dalam proses pengambilan keputusan tetap ditangan pemerintah. Selain itu masih kurangnya pengawasan dan control dari masyarakat untuk mengawal proses kegiatan tersebut.

Ada beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada musrenbang, diantaranya :

Konsep perencanaan bendung bak sedimen yang diberikan pada titik sungai yang masuk di wilayah danau tempe.

Pemerintah sudah memutuskan untuk mempercepat pengembangan Danau Tempe termasuk pembuatan pulau di tengahnya, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nantinya, pulau itu akan dijadikan lahan pertanian.

Hasil analisis proses komunikasi yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui formal maupun informal dapat didengarkan suaranya melalui musrenbang dengan tingkat intensitas pertemuan yang sudah baik, dan komunikasi partisipatif dari masyarakat desa terapung yang ada disekitar wilayah tersebut.

Proses komunikasi menunjukkan bahwa adanya siklus yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan mulai dari aspirasi masyarakat pada musrenbang yang disampaikan melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi kedua lembaga tersebut sehingga nantinya diharapkan aspirasi mereka dapat segera direalisasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Bina Aksara : Jakarta
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. PT. Rajagrafindo: Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Etyanto. 2008. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Pradnya Widya: Jakarta
- Everett, M, Rogers. 1986. *Communication Technology*. Sage Publication. New Delhi
- Mulyana, Deddy. 2004. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya; Bandung
- Nyoman. Sumaryadi 2010. *Partisipasi Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka : Jakarta
- Sugiyah. 2001, *Partisipasi Pembangunan*, ISMEE: Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung
- White, SA; Nair, KS; dan Ascroft, J. 2004. *Participatory Communication: Working for Change and Development*. Sage Publication. New Delhi

Tabel 1. Kriteria Penilaian

N o.	Kategori	Jumlah Skor	Rata- rata Skor
1.	Sangat Baik/Jelas/Memadai	101 -120	4,21 - 5,00
2.	Baik/Jelas/Memadai	81 – 100	3,41 - 4,20
3.	Cukup Baik/Jelas/Memadai	62 - 80	2,61 - 3,40
4.	Tidak Baik/Jelas/Memadai	43 - 61	1,81 - 2,60
5.	Sangat Tidak Baik/Jelas/Memadai	24 - 42	1 - 1,80

Sumber: Kepmen PAN NOMOR:KEP/25/M.PAN/2/2004